SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH DESA AIKMEL UTARA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA AIKMEL UTARA TAHUN 2019/2020

Oleh

SITI NURLIZA JUNIARTI
NIM. 218110020

KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMMADIYAH MATARAM
2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH DESA AIKMEL UTARA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA AIKMEL UTARA TAHUN 2019/2020

Oleh:

SITI NURLIZA JUNIARTI
NIM. 218110020

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Unversitas Muhammadiyah Mataram

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Mintasrihardi, M.H.	**M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP.**
NIDN.0830016101	**NIDN.0809039203**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Rahmad Hidayat,S.AP., M.AP.
NIDN. 0822048901

ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH DESA AIKMEL UTARA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA AIKMEL UTARA TAHUN 2019/2020

Oleh :

Siti Nurliza Juniarti
NIM. 218110020

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 04 Februari 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji:

1. **Drs. Mintasrihardi, M.H.** (_____) **(PU)**
   NIDN. 0830011601
2. **M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP. M.IP.** (_____) **(PP)**
   NIDN. 0809039203
3. **Dedy Iswanto, S. T., M.M.** (_____) **(PN)**
   NIDN. 0818087901

Mengetahui Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN. 0806066801

iii

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurliza Juniarti

NIM : 218110020

Dengan menyatakan bahwa :

1. **Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).**
2. **Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.**
3. **Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulisatau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagi acuan dalam naskah dengan disebutkan nam pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.**
4. **Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.**

Mataram, 04 Februari 2022

Siti Nurliza Juniarti

NIM. 218110020

iv

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NURLIZA JUMIARTI
NIM : 218110020
Tempat/Tgl Lahir : Dasan Lian, 17 Juni 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp : 087754381292
Email : atinurliza315@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

UPAYA PEMERINTAH DESA AIKMEL UTARA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA AIKMEL UTARA TAHUAN 2019 / 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 379

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 19 Februari 2022
Penulis

Siti Nurliza Jumiarti
NIM. 218110020

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NURLIZA JUNIARTI
NIM : 21011O020
Tempat/Tgl Lahir : Dasan Lian, 17 Juni 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu sosial dan Politik
No. Hp/Email : 087759581292 / sitinurliza321502gmail.com
Jenis Penelitian : ☑Skripsi ☐KTI ☐Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

USAHA PEMERINTAH DESA AIKMEL UTARA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA AIKMEL UTARA TAHUN 2019 / 2020

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 Februari 2022
Penulis

Siti Nurliza Juniarti
NIM. 21011O020

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

vi

MOTTO

**"*Ketika dalam kesulitanmu orang-orang meninggalkanmu,*

***Itu bisa jadi karena Allah sendirilah yang akan mengurusmu*"**

~Imam Syafi'iRA~

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN

1. **Untuk kedua orang tua saya tercinta, Terimakasih a tas segala cinta dan kasih sayang serta doa restu sehingga ananda bisa sejauh ini. Semoga Allah selalu memberikan kebahagian serta panjang umur dalam keadaan sehat wal ‘afiat.**
2. **Untuk Adekku satu-satunya MaulinaAzizah Terimakasih atas doa dan bantuan selama menjalankan proses penelitian.**
3. **Untuk Om Zamroni Kurniyawan Terimakasih atas doa serta sudah membantu mengumpulkan data-data selama penelitian.**
4. **Untuk semua keluarga yang tidak bisa kusebutkan satu per satu terimakasih atas segala doa dan support.**
5. **Untuk teman-teman yang telah berjasa kepada saya selama proses perkuliahan dan yang masih bertahan sampai saat ini saya ucapkan terimakasih kepada kalian.**
6. **Buat orang-orang baik yang saya temukan selama perkuliahan terimakasih atas doa dan bantuannya.**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan ridho Allah SWT. Karena tanpa rahmat dan ridho-Nya penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Upaya Pemerintah Desa Aikmel Utara dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Aikmel Utara Pada Tahun 2019/2020**" dengan baik dan selesai tepat waktu. Tidak lupa pula sholawat serta salam tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengantarkan umat pada agama Islam yang rahmatanlil'alamin hingga saa tini.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP. Selaku ketua Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. Mintasrihardi, M.H. selaku dosen pembimbing utama dalam penyususnan skripsi ini.

5. Bapak M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP. selaku dosen pembimbing pendamping dalam penyusunan skripsi ini.
6. Terimakasih Untuk Segenap Pemerintah Desa Aikmel Utara dan seluruh pengelola BUMDes Mitra Rinjani, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya selama melakukan proses penelitian.
7. Terimakasih terlebih khusus kepada kedua orang Tua yang sudah memberikan do'a, motivasi, serta dukungan semangat bagi peneliti agar dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik.
8. Terimaksih kepada seluruh keluarga, teman-teman sertarekan-rekan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2018. .
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa, motivasi, masukan serta semangat hingga dapat terselesainya skrip sini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, mungkin terdapat kekurangan atau kesalahan yang belum penulis ketahui. Maka dari itu, penulis mohon saran dan kritik dari dosen maupun teman-teman demi tercapainya skripsi yang sempurna. Sekian dan terimakasih.

Mataram, 04 Februari 2022

Penulis

SitiNurlizaJuniarti
218110020

ABSTRAK

Upaya Pemerintah Desa Aikmel Utara Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Aikmel Utara Tahun 2019/2020

Siti Nurliza Juniarti[1], Drs. Mintasrihardi, M.H.[2], M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP.,M.IP.[3]

[1]Mahasiswa
[2]Pembimbing Utama
[3]Pembimbing Pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui upaya pemerintah desa dalam mengelola BUMDes di desa Aikmel Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa pada Tahun 2019/2020.

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Aikmel Utara, Sekretaris Desa Aikmel Utara, Pengelola BUMDes Mitra Rinjani dan anggota masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Pemerintah desa Aikmel Utara dalam mengelola BUMDes Mitra Rinjani sudah melakukan bebrapa hal yang cukup baik untuk meningkatkan pendapatan asli desa yaitu mulai dengan perencaan pengelolaan BUMDes Mitra Rinjani, pembentukan kepengurusan BUMDes Mitra Rinjani, pelaksaan program dan kegiatan BUMDes dan pengawasan pengelolaan BUMDes Mitra Rinjani. Dan dalam dalam proses pengeloaannya ada masalah-masalah yang dihadapi oleh pengelola adalah: 1) BUMDes Mitra Rinjani belum mempunyai kantor, 2) Adanya wabah Covid-19 yang berdampak terhadap dunia usaha, dan 3) Terjadinya kecurangan oleh pihak ke tiga.

Kata kunci: Pengelolaan, BUMDes, PADes.

ABSTRACT

The Village Government of North Aikmel's Efforts to Manage Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Order to Increase Village Original Income of the North Aikmel Village 2019/2020

Siti Nurliza Juniarti[1], Drs. Mintasrihardi, M.H.[2], M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP.,M.IP.[3]

[1]Student
[2]Main Advisor
[3]Companion Advisor
Muhammadiyah University of Mataram

This study intends to assess the village government's efforts in managing BUMDes in North Aikmel village, as well as what factors support and limit BUMDes' ability to increase Village Original Income in 2019/2020. This type of study is descriptive in nature and uses a qualitative methodology. The North Aikmel Village Head, North Aikmel Village Secretary, BUMDes Manager Mitra Rinjani, and community members were the study's informants. Observation, interviews, and documentation were utilized to obtain data. Data reduction, data presentation, and conclusion drafting are the methods of data analysis.

The findings show that the North Aikmel village government's efforts in managing BUMDes Mitra Rinjani have done a lot to boost village original income, starting with planning for BUMDes Mitra Rinjani management, establishing BUMDes Mitra Rinjani management, implementing BUMDes programs and activities, and supervising BUMDes management. Rinjani is my partner. And there are issues that the manager has in the management process, such as: 1) Mitra Rinjani BUMDes does not yet have an office, 2) The Covid-19 outbreaks have an impact on the corporate sector, and 3) Third-party fraud.

Keywords: *Management, BUMDes, PADes.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **v**
PERNYATAAN BERSEDIA DIPUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **x**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUN PUSTAKA **8**
2.1. Penelitian Terdahulu 8
2.2. Landasan Teori 15
2.2.1.Teori Pemerintah 15
2.2.2.Pemerintah Desa 18
2.2.3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 20
2.2.4. Pengelolaan BUMDes 22
2.3. Kerangka Konseptual 25
2.3.1. Kerangka Berpikir 26

BAB III METODE PENELITIAN **27**
3.1. Jenis Penelitian 27
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 27
3.3.Pemilihan Narasumber 28
3.4.Sumber Data 28
3.5.Teknik Pengumpulan Data 29
3.7.Teknik Analisis Data 30

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **31**
4.1. Deskripsi Objek Penelitian 31
4.1.1. Gambaran Umum Desa Aikmel Utara 31
4.1.2. Kelembagaan dan Sistem Kelembagaan Desa Aikmel Utara 40
4.1.3. Deskripsi Badan Usaha Milik (BUMDES) Desa MitraRinjani 43

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....47
4.2.1. Upaya Pemerintah Desa dalam Mengelola BUMDes di Desa Aikmel Utara.....47
4.2.1.1. Perencanaan Pengelolaan BUMDes Mitra Rinjani.....47
4.2.1.2. Pembentukan Kepengurusan BUMDes Mitra Rinjani.....56
4.2.1.3. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan BUMDes Mitra Rinjani.....61
4.2.1.4. Pengawasan Pengelolaan BUMDes Mitra Rinjani.....76
4.3. Masalah-Masalah dan Upaya Penyelesaiaanya.....77
4.3.1. BUMDes Mitra Rinjani Belum Mempunyai Kantor.....78
4.3.2. Adanya Wabah Covid-19.....80
4.3.3. Terjadinya Kecurangan oleh Pihak ke Tiga.....81

BAB V PENUTUP.....83
5.1. Kesimpulan.....83
5.2. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA.....86
LAPIRAN-LAMPIRAN.....89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 8
Tabel 2 Narasumber Peneleitian 28
Tabel 3 Daftar Nama Kepala Desa Aikmel Utara 32
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 34
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 35
Tabel 6 Jumlah Umur Berdasarkan Tingkat Pendidikan 35
Tabel 7 Sarana dan Prasarana yang ada di Desa 36
Tabel 8 Jumlah Prasarana Air Bersih 37
Tabel 9 Sarana Prasarana Rumah Ibadah 37
Tabel 10 Data Keelembagaan Desa Aikmel Utara 38
Tabel 11 Jumlah Dusun dan RT 39
Tabel 12 Daftar Pengurus BUMDes Mitra Rinjani 46
Tabel 13 Data Perencaan BUMDes Mitra Rinjan 2019-2020 49
Tabel 14 Daftar Hadir MUSDes Tentang Perencaan Program BUMDes 52
Tabel 15 Berita Acara MUSDes Perencaan Program dan Kepengurusan BUMDes .54
Tabel 16 Daftar Pengurus BUMDes Mitra Rinjani Tahun 2017-2022 59
Tabel 17 Laporan Laba Rugi Tahun 2019 69
Tabel 18 Sisa Hasil Usaha BUMDes 2019 70
Tabel 19 Pendapatan dan Sumber Pendapatan Tahun 2020 71
Tabel 20 Laporan Laba Rugi Tahun 2020 72
Tabel 21 Sisa Hasil Usaha BUMDes 2020 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir.....26
Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Aikmel Utara.....43
Gambar 3 Struktur Kepengurusan BUMDes Mitra Rinjani.....60
Gambar 4 Kegiatan Monitoring Pemerataan Pemakaian PAMDes 63
Gambar 5 Kegiatan Sosialsasi Kepada Pengelola BUMDes 65
Gambar 6 Rapat Evaluasi Pengelola BUMDes Mitra Rinjani 67

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dan menganut sistem demokrasi yang memberi wewenang, hak dan kewajiban bagi setiap daerahnya untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri demi meningkatkan kesejahteraan kehidupan yang lebih baik dalam bidang politik, budaya, ekonomi, sosial maupun agama.

Di dalam tatanan pemerintahan Indonesia, Desa dikatakan sebagai unit terkecil dalam tatanan pemerintahannya. Dengan demikian pemerintah Desa mempunyai peran dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakatnya untuk lebih mandiri, dengan cara mengoptimalkan sumberdaya yang ada, baik itu dari sumber daya alam maupun sumberdaya manusia. Solow dan Swam dalam Arsyad mengemukakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi yaitu penduduk, tenaga kerja,modal dan tingkat kemajauan teknologi (Arsyad L. , 2010).

Dalam era otonomi yang telah banyak memberi dukungan pada setiap daerah untuk memberikan kesempatan kepada setiap desa untuk dapat menggali potensi yang ada baik dari sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada di wilayah desa tersebut yang nantinya bisa menjadi jalan sebagai sumber pendapatan desa. Tentu pemerintah desa dapat

membentuk program-program yang nantinya masyarakat juga akan ikut berpartisipasi dalam program-program yangdilaksanakan oleh pemerintah desa, salah satunya adalah program Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes ini antara lain adalahUndang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 menyebutkan bahwa "pemberdayaan masyarakatDesa adalah upaya mengembangkan kemandirian dankesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakatdesa". (UU No 6 Tahun 2014)

Namun sebelum UU No 6 Tahun 2014 sudah terlebih dahulu diundangkan yang paling khusus terkait dengan keberadaan desa (meskipun tidak secara eksplisit tersebut dalam pasal) adalah pada pasal 18 B ayat (2) UUD 1954 yaitu: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." (badan usaha milik desa-dan-pembentukannya, 2016)

Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang berkaitan dengan pemerintah Daerah, desa disebut secara definitif dan keberadaan BUMDes sudah diakui, yaitu disebut dalam pasal 213: (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.Dengan demikian eksistensi BUMDes sebagai lembaga ekonomi sudah diakui sejak tahun 2004, namun peraturan perundangan yang membahas lebih rinci tetang BUMDes baru tersedia pada tahun 2014. (badan usaha milik desa-dan-pembentukannya, 2016)

Sejak sebelum pengundangan UU Desa hingga tahun 2020 jumlah BUMDes di Indonesia tercatat sebanyak 51.134 BUMDes. Dan dari jumlah BUMDes yang ada di Indonesia tersebut pada tahun 2020 tercatat ada 984 BUMDes yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah terbanyak mendirikan BUMDes yaitu sebanyak 238 BUMDes.

Di Kabupaten Lombok Timur ada 20 BUMDes mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur.Desa yang diberikan bantuan tersebut merupakan BUMDes yang dinilai sudah maju dalam pengelolaanya, berdasarkan lapotran yang diterima DPMD Lombok Timur. Adapun 20 Desa yang mendapat bantuan tersebut ialah BUMDes Suela, Masbagik Utara Baru, Setanggor, Kembang Kuning, Suela, Gunung Rajak, Sugian, Labuhan

Lombok, dan Pringgasela. Kemudian Pasenggrahan, Wanasaba Lauk, Presak, Pandan Wangi, Korleko, Senyiur, Kelayu Selatan, Surabaya, Slagek, Dasan Borok dan Sajang.**(Lotim, 2020)**

Dari data BUMDes maju yang tercatat di Lombok Timur, BUMDes yang ada di Aikmel Utara tidak masuk dalam kategori BUMDes yang maju. Desa Aikmel Utara merupakan hasilpemekaran dari desa Aikmel pada tahun 1991.Sehingga pada tanggal 06 Oktober 2017 desa Aikmel Utara membentuk Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama MITRA RINJANI.

Dengan dibentuknya unit-unit usaha dalam BUMDes Mitra Rinjani maka dibentuk dalam penggalian potensi. Setelah dibentuknya BUMDes pada tahun 2017, pada tahun 2019 ada 4 unit usaha yang sudah berjalan, unit-unit usaha tersebut antara lain: unit usaha PAMDes, unit usaha Perdagangan, unit usaha Peternakan dan unit usaha gedung serbaguna. Namun pada tahun 2020 ada 3 unit usaha yang masih berjalan yaitu unit usaha PAMDes, unit usaha Perdagangann dan unit usaha Peternakan.

Unit usaha PAMDes pada tahun 2019 dan 2020 melayani 90% dari jumlah penduduk yang ada di Aikmel Utara yang tersebar di 5 kewilayahan yang ada di aikmel utara. Untuk usaha perdagangan sejak di bentuk pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang tidak signifikan, pada tahun 2019 mengalami penurunan hal ini disebabkan terbatasanya jumlah tabung gas LPG 3 kg yang diberikan oleh perusahaan dengan kemampuan penjualan yang dimiliki berkisar diatas 15000 tabung pertahun sementara perusahaan memberikan 8.875 tabung selama satu tahun. Dan pada tahun 2020

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mulanya dapat menjual 8.875 tabung pada tahun 2020 dapat menjual 6.287 tabung pengalami penurunan penjualan 2.588 tabung. (Laporan Pertanggung jawaban BUMDes Aikmel Utara Tahun 2019/2020)

Untuk unit peternakan yang dibentuk pada akhir tahun 2019 telah berperoduksi sebanyak 1 X produksi, dan pada tahun 2020 sebanyak 6 x produksi sistem yang di lakukan dengan sistem kemitraan dengan PT. Dan pada tahun 2020 unit gedung serba guna sejak mulai beroperasinya pada tahun 2017 selalu mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan sehingga mengalami kerugian dari tahun ke tahun, untuk mengantisipasi kerugian tersebut melalui rapat koordinasi dengan pemerintah desa bersama BPD pada tahun 2020 unit gedung serbaguna dikembalikan pungsinya ke pemerintah desa.

Untuk penyertaan modal BUMDes Pada tahun 2018 Pemerintah Desa menyertakan modal sebesar Rp. 50.000.000, dan pada tahun 2019 penyertaan modal sebesar Rp. 150.000.000. Dari data keungan terlampir pendapatan BUMDes Mitra Rinjani tahun 2019 yang bersumber dari 4 unit usaha diantaranya unit usaha PAMDes sebesar Rp.68.150.850, unit usaha Gedung Serbaguna sebesar Rp. 3.305.000, unit usaha perdagangan sebesar Rp. 17.748.500, unit usaha peternakan RP. 16.280.000 dan adapun pendapatan lain diluar usaha sebesar Rp. 389.346 sehingga total pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp. 105.872.846. (Laporan Pertanggung jawaban BUMDes Aikmel Utara Tahun 2019)

Dan dari data keuangan terlampir pendapatan BUMDes Mitra Rinjani pada tahun 2020 yang bersumber dari 3 unit usaha diataranya Unit usaha PAMDes sebesar Rp 48.766.500, unit usaha Perdagangan sebesar Rp 15.066.000, unit usaha peternakan Rp 50.779.942 sehingga total pendapatan per 31 desember tahun 2020 Rp 114.612.442. (Laporan Pertanggung jawaban BUMDes Aikmel Utara Tahun 2020)

Maka dari beberapa penjelasan data dan program-program yang ada, BUMDes Mitra Rinjani ini programnya memang tidak banyak, meski hanya memiliki tiga program utama namun diharapkan bisa berjalan lancar. Akan tetapi dalam dua tahun terakhir masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksaannya yang dapat dilihat dari turun naiknya pendapatan BUMDes dari setiap unit usaha yang ada pada tahun 2019/2020 maka hal tersebut berpengaruh terhadap Pendapatan Asli desa. Dalam pelaksaan BUMDes ini peran pemerintah desa sangatlah penting untuk kemajuan BUMDes.

Oleh Karena itu berdasarkan dari paparan latar belakang diatas terkait permasalahan yang ada maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Upaya Pemerintah Desa Aikmel Utara dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Aikmel Utara Pada Tahun 2019/2020"

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka sebagai rumusan masalah yang dikaji adaalah bagaimanakah Upaya Pemerintah Desa dalam Mengelola BUMDes di Desa Aikmel Utara?

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Desa dalam Mengelola BUMDes di Desa Aikmel Utara

1.2.2 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan kajian terhadap upaya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

2. Manfaat Praktis

   Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak-pihak yang terkait dan sebagai informasi awal kepada mereka yang meminati penelitian lanjutan di bidang kompetensi BUMDes dan PADes.

3. Manfaat Secara Akademis

   Dapat menambah pengetahuan tentang pemerintah desa terutama mengenai BUMDes dan PADes serta segala ruang lingkupnya dan juga sebagai aplikasi teori yang telah didapatkan peneliti selama menempuh perkuliahan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan penulis untuk memperdalam penelitian.Sehingga selanjutnya penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam menyusun penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan penulis, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Sehingga penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi untuk menambah kajian pada penelitian penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya:

TABEL 2.1.1
PENELITIAN TERDAHULU

NO	Nama Penulis dan Tahun	Judul/ Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Fery Fadly Rizky (2019)	Upaya Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rocek Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang. /Kualitatif	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa PengembanganBUMDes yang di lakukan di Desa Rocek dapat dikatakan belum efektif dalam proses pelaksaannya. Hal Ini dapat dilihat dari kekurangan-kekurangan yang dialami oleh pengelolaBUMDes. SDM dan kesadaran tentang pentingnya BUMDes oleh masyarakat adalah kekurangan dan hambatan yang paling terlihat.
2	RAHMAT. B (2020)	Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaanBUMDes Bunginmenerapkan prinsip tata kelola seperti :

		di Desa Bungin Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang./ Kualitatif	Transparansi dengan keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat, akuntabilitas yaitu melakukan laporan pertanggungjawaban, fairness dengan pengambilan keputusan dalam mupakat, serta responsibilitas yaitutidak merusak lingkungan dan menaati peraturan yang berlaku.
3	Ashar Prawitno, Rahmatullah, Safriadi (2019)	Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa ./Deskriptif	Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa untuk pemebentukan, pemerintakan kabupaten Gowa telah melakukan Upaya pemebentukan BUMDes diseluruh bagian Kabupaten Gowa. Untuk mendukung jalannya roda organisasi Desa yaitu pada peraturan Kab.Gowa No.7 Tahun 2015 tentang tatacara membentuk dan pengelolaan BUMDes. Namun permasalahan dalam pengelolaan BUMDes masih bersifat lamban dan cenderung menurun
4	Andriani Sari (2017)	Pengaruh BUMDES terhadap pengembangan ekonomi desa di kecamatan perbaungan kabupaten serdang bedagai/ Kualitatif	Berdasarkan peraturan desa untuk mensejahterankan masyarakat maka pengelolaan BUMDes telah mengelolaBUMDes dengan baik di Kecamatan Perbaungan.Namun terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya BUMDes yang dilihat berdasarkan pendapatan masyarakat maka dari itu artinya berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan.

5	Hartini (2019)	Peran Badan Usaha Miik Desa (BUMDes) dalam menigkatkan kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangnga Kab.Polman (Tinjaun Ekonomi Islam)/ Deskriptif Kualitatif	Ada beberapa hasil dalam penelitian ini yaittu adalah: 1) Aapabila dilihat dari program-program yang dijalankan maka dapat dilihat dari kegiatan BUMDes sudah jelas untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batetangnga. 2) Dengan menjalankkann BUMdes yang dijalankan seperti kerja, kompensasi, efisiensi, profesionalisme dan kecukupam maka BUMDes Batetangnga sudah dapat dikatan sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam.
6	Fifianti (2018)	Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar/Kualitatif	Hasil dalam penelitian ini adalah BUMDes yang dibentuk di Desa Patani kurang efektif untuk membantu kemandirian Desa Patani. Karena dalam pembimbingan dan pengawasan pada pengelola BUMDes kurang optimal yang diberikan oleh Pemerintah Desa.
7	Adi Firmansyah (2018)	Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kec. Tanete Riaja Kab. Barru/Deskriftif Kualilatif	Hasil pada penelitian ini adalah dapat dikatakan belum efektif. Karena belum sesuai dengan visi misi BUMDes di Kecamatan Tanete Riaja Kab. Barru yang ingin membentuk Desa sebagai desa yang mandiri.
8	Nikmah Sholihati (2020)	Peran Dan Efektifitas Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar/ Kualitatif	Pada penelitian menunjukkan hasil bahwa peran BUMDes dalam masyarakat cukup baik namun belum maksimal, peran tersebut seperti pengembangan potensi desa mellaui pemanfaatan lahan pertanian desa maupun SDM

			Desa, peningkatan usaha rumah tangga, penyedia lapangan pekerjaan, serta peningkatan sosial masyarakat. Tingkat efektivitas Bumdes Juga cukup berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan meskipun belum maksimal.
9	Yeni Fajarwati (2016)	Implentasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kec. Pagedangan Kabupaten Tangerang/Kualitatif Deskriptif	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes secara umum sudah berjalan dengan baik. walaupun dalam perencaan keuangan dan program belum terkelola dengan baik sehingga program BUMDes belum sepenuhnya berjalan optimal seperti kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosilisasi dan minimnya koordinasi sehingga beberapa hal tersebut harus diperbaiki.
10	Fatimatuz Zahro (2021)	Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak/Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya badan usaha milik desa untuk pemberdayaan masyarakat di desa tambakbulusan dikatakan belum baikdikarenakan BUMDes masih menghadapi beberapa hambatan yaitu sumberdaya manusia yang belum memadai, permodalan, beberapa pengurus memilki pekerjaan ganda diluar BUMDes, infrastruktur yang kurang terpenuhi. Namun adanya peran BUMDes sudah berdampak positif terhadap beberapa perekonomian masyarakat yang kurang mampu.

Fery Fadly Rizky (2019) meneliti tentang "Upaya Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rocek Kec.Cimanuk Kabupaten Pandeglang" persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.Dalam penelitian ini juga sama-sama menjelaskan upaya pengelolaan BUMDes dan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya.Dimana, penelitian terdahulu dilaksanakan di Desa Rocek Kec. Cimanuk Kab. Padeglang, Banten. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di desa Aikmel Utara kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Rahmat. B (2020) meneliti tentang "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungin Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang" dengan persamaan yang ditulis peneliti dengan penulis adalah menggunkan penelitian jenis penelian yang sama yaitu kualitatif dan tujuan variabel yang sama yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli desa sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya.

Ashar Prawitno, Rahmatullah, Safriadi (2019) meneliti tentang "Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa" memiliki persamaan yang penulis tulis yaitu adalah membahas bagaimana BUMDes meningkatkan pendapatan asli desa. Dan perbedaanya yaitu pada metode penelitian, dalam penelitian terdahulu menggunakan deskriptif sedangkan

penelitian ini menggunkan jenis kualitataif deskriptif. Dan bedanya juga penelitian terdahulu disini penelitiannya tingkat kabupateen sedangkan penelitian ini tingkat desa.

Andriani Sari (2017) meneliti tentang "Pengaruh BUMDES terhadap pengembangan ekonomi desa di kecamatan perbaungan kabupaten serdang bedagai" persamaannya dengan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dan membahas perekonomian desa.Dan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana pengaruh BUMDes untukmengembangkan ekonomi sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan upaya pemerintah desa dalam mengelola BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Hartini (2019) meneliti tentang "Peran Badan Usaha Miik Desa (BUMDes) dalam menigkatkan kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangnga Kab.Polman (Tinjaun Ekonomi Islam" dimana persamaannya dengan penelitian ini adalah menulis tentang BUMDes dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan perbedaanya penelitian terdahulu menggunkan tinjauan ekonomi Islam dan penelitiaan ini menggunakan tinjauan ekonomi umum.

Fifianti (2018) meneliti tentang "Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar" adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif serta pemerintah ikut berperan di dalamnya sedangka

perbedaanya adalah penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan BUMDes sedangkan dipenelitian ini menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam upaya pengelolaan BUMDes.

Adi Firmansyah (2018) meneliti tentang "Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kec. Tanete Riaja Kab. Barru" dimana penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas pengelolaan BUMDes akan tetapi bedanya adalah pada penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana efektifitas dan efisiensi dalam mengelola keuangannya sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan bagaima upaya pengelolaannya untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Nikmah Sholihati (2020) meneliti tentang "Peran Dan Efektifitas Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar" dan persamaan penelitian ini adalah menggunakan jenis penilian yang sama yaitu penelitian kualitatif adapun perbedaanya adalah untuk penelitian terdahulu menjelaskan efektifitas dan peraan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam mengelola BUMDes.

Yeni Fajarwati (2016) meneliti tentang "Implentasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kec.Pagedangan Kabupaten Tangerang" dan persamaannya adalah membahas tentang

BUMDes adapun perbedaanya adalah pada penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana pengimplementasian program yang ada di BUMDes sedangkan pada penilitian ini menjleaskan bagaimana upaya penglolaan BUMDes.

Fatimatuz Zahro (2021) meneliti tentang "Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak)" dengan persamaan yang ditulis oleh peneliti yaitu menggunkaan penelitian kualitatif dan memiliki dampak positif bagi desa dan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana mengoptimalkan peran BUMDes yang ada di Desa Tambakbulusan sedangkan pada penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam mengolala BUMDes.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Pemerintah

Bagi *Aritoteles, politeia* diturunkan dari kata "*polis"* yang artinya adalah kota yang merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang didalamnya terlibat beberapa orang yang sebagian berasal dari rakyat yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak mementingkan pribadinya melainkan untuk melayani masyarakat dan menyelenggarakan kepetingan umum.

Berdasarkan yang telah dinyatakan oleh*Aristoteles* bahwa negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan

berkedaulatan hukum.*Aristoteles* lebih lanjut berpendapat bahwa adanya suatu pemerintahan yang berdasarkan konstitusi akan terlihat dari tiga unsur, yaitu:pertama pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua pemerintahan dilaksanakan menurut hukum berdasarkan ketentuan umum yang tidak dibuat secara semena-mena, dan ketiga adanya pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan dengan paksaan (Satriya,2016)

Adapun pemerintah menurut *Van Vollenhoven* menganjurkan teori Catur Praja (*Quarto Politica*) yang terdiri atas penyelenggara pemerintahan, kepolisian, keadilan, dan legislatif.Menyelenggarakan pemerintahan mangandung makna untuk lebih aktif menjalan tugasanya, dan *Van Vollenhoven* memperkenalkan prinsip *vrijbestuur* dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kewajiban dan hak yang melekat pada diri pejabat publik setelah diangkat.

Kewajibannya adalah untuk mematuhi*stelsel residual theory*, yaitu melaksanakan segala tugas selain tugas-tugas kepolisian, peradilan dan legislatif walaupun tugas tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit.Dengan demikian pemerintah memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan demi menjaga kepentingan rakyat untuk melaksanakan kewajiban tersebut..

Berdasarkan teori residu dari *Van Vollenhoven* dalam bukunya "*Omtrek Van Het Administratief Recht*", membagi kekuasaan/fungsi pemerintah menjadi empat yang dikenal dengan teori catur praja yaitu:

1) Fungsi memerintah (*Bestuur*) Dalam negara yang modern, fungsi bestuur adalah tidak hanya terbatas pada pelaksaan undang-undang saja namun memiliki tugas yang sangat luas yang banyak ikut mencampuri kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik .
2) Fungsi polisi (*Politie*) adalah fungsi untuk melaksanakan pengawasan secara *preventif* yaitu memaksa penduduk suatu daerah untuk mematuhi ketertiban hukum dan mengadakan penjagaan supaya tata tertib tetap terpelihara dalam masyarakat tersebut.
3) Fungsi mengadili (*Justitie*) merupakan fungsi pengawasan yang sifatnya represif yaitu bahwa fungsi ini melaksanakan pengawasan yang nyata, sehingga perselisihan yang ada dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangaan secara adil.
4) Fungsi mengatur (*Regelaar*) adalah suatu kewajiban hukum untuk memperoleh atau mendapatkan semua hasil legislatif dalam arti material yang artinya setiap aturan dan ketetapan yang dibut oleh pemerintah memiliki ikatan sebagian atau seluruh penduduk wilayah suatu negara.

Untuk beberapa teori yang telah dikemukakanoleh paraahli di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang disebut pemerintah adalah sekelompok individu yang memilki wewenang tertentu untuk menjalankan kekuasaannya.Pemerintah yang berdaulat memiliki hak untuk mengurus dan mengatur wilayah negara serta menjaga dan memelihara ketertiban

umum untuk melindungi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan sebagainya.

2.2.2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat.(PP No 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 6)

Dalam undang-undangPasal 23 Nomor 6 Tahun 2014 tentng desa, menegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 merumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Maka pemerintahan Desa adalah organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,

b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:

1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:

3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun. (Nurcholis.2011)

Pemerintahan desa dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat mempunyai peran yang penting di dalamnya. Tugas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi serta memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan.Dalam konteks nasional, tata pemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat baik dalam hal pembangunan maupun penyelenggaraan negara secara umum.Ketiga unsur tersebut disyaratkan bersinergi dalam rangka membangun tata pemerintahan yang baik dilembaga penyelenggara negara, dunia usaha, dan berbagai kegiatan masyarakat. (Abdullah. 2009)

Dengan demikian jika dilihat dari teori pemerintah yang telah dipaparkan oleh *Aritoteles,Van Vollenhoven* dan terkait pengertian pemerintah desa yang tercantung pada undang-undang makapemerintah yang baik adalah yang mampu melaksankan tugasnya secara optimal dan mendalam yang dilaksanakan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan mampu mengarahkan dan membangun masyarakat menjadi lebih mandiri demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yaitu melalui fartisifasi langsung yang berasal dari kekayaan desa yang terpisah untuk kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Kepala Desa setelah didiskusikan dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. (Tisnawati & Kurniawan, 2005)

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis memberi kesimpulan bahwa BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, dengan tujuan supaya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa barang dan jasa untuk membantu desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Adapun modal usaha BUMDes tersebut berasal dari desa dan masyarakat serta pemerintah desa yaitu pada alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBDes sebagai pendapatan asli desa.

1) TujuanPendirianBUMDes

Berdirinya BUMDes ditujukan menjadi jalan untuk menampung segala kegiatan dalam bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa.

Berikut merupakan beberapa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan perekonomian Desa, yaitu dengan cara masyarakat ikut serta dalam kegiatan BUMDes dengan harapan masyarakat desa

mampu meningkatkan perekonomianya melalui program BUMDes.

b) Mengoptimalkan aset desa sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa yaitu untuk meningkatkan usaha masyarakat yang terkendala dengan modal.
d) Mengembangkan rencangan kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e) Mewujudkan peluang dan jaringan pasar untuk membantu memenuhi kebutuhan layanan umum warga;
f) Membuka lapangan kerja.
g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi desa dan pertumbuhan serta memperbaiki pelayanan umum.
h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

Tujuan ini tertera pada BAB II Pasal3 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015,tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.(Peraturan Menteri. Nomor 4 Tahun 2015)

2) Manfaat BUMDes

Pada Bab 10 pasal 89 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa hasil dari BUMDes dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, yang artinya bahwa

BUMDes hadir untuk mengembangkan segala usaha masyarakat desa supaya lebih meningkat lagi. Selain itu hasil BUMDes dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dana bergulir serta pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang telah diataur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2.2.4. Pengelolaan BUMDes

a. Pengertian pengelolaan

Proses yang memberikan pengawasan untuk semua yang terlibat dalam pengimplementasian kebijaksanaan dan keberhasilan tujuan. Pengelolaan juga diartikan sebagai kegiatan yang merubah sesuatu sehingga menjadi lebih baik untuk memiliki nilai-nilai yang tinggi dari sebelumnya. Dan pengelolaan juga adalah sesuatu yang dapat dilakukan agar lebih sesuai denganapa yang dibutuhkan untuk lebih bermanfaat lagi.

Balderton, memaparkan pengertian dari pengelolaan yaitu sama dengan manajemen yang berarati menggerakkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan usaha manusia untuk bisa dimanfaatkan secara efektiv material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. (Rahardjo Adisasmita, 2011)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu

pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

b. Ciri-ciri Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Pengelolaan yang baik menurut Geroge R. Terry dalam Inu Kencana Syafiie merupakan elemen yang penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.Berikut pengelolaan yang baik meliputi empat hal :

1) Perencanaan (Planning) merupakan untuk memilih fakta-fakta dan usaha menggabungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, selanjutnya membentuk perkiraan dan prosesmengenai keadaan dan formulasi tindakan untuk mencapai hasil yang dikehendaki diwaktu yang akan datang yang sekiranya diperlukan.

2) Pengorganisasian (Organizing) adalah sebagai usaha untuk mengaplikasikan segala kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja serta menetapkan wewenang tertentu dan tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3) Penggerakan (Actuating) diartikan untuk menempatkan semua anggota untuk setiap kelompok supaya bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4) Pengawasan (Controlling) merupakan proses penentuan yang akan didapatkan, koreksi dan pengukuran yang dilakukan terhadap aktivitas pelaksanaan dan apabila perlu untuk mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan sehingga dapat berjalan sesuai rencana.

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyertamodal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1) Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus

bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6) Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. (Bappenas, Buku Panduan BUMDES, 2007)

2.3.Kerangka Konseptual

BUMDes adalah sebuah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, didirikannya antara lain untuk meningkatkan pendapatan asli desa. jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu mendorong setiap pemerintah mempunyai peran penting dalam proses pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberi gambaran dengan judul dan teori yang telah dibahas. Adapun teori yang dikemukakan oleh *Aritoteles,*

VanVollenhoven dan terkait pengertian pemerintah desa yang tercantung dalam undang-undang makapemerintah yang baik adalah yang mampu melaksankan tugasnya secara optimal. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dan peran pemerintah desa dalam upaya pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Aikmel Utara maka ada empat indikator yang digunakan, yaitu: 1) Perencanaan (Planning), 2) Pengorganisasian (Organizing), 3) Penggerakan (Actuating), dan 4) Pengawasan (Controlling). Maka dari keempat indikatot tersebut diharapakan untuk dapat mewujudkan pengelolaan BUMDes yang lebih baik dan efisien untuk mencapai keberhasilan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa seperti yang diharapkan.

2.3.1. Kerangka Berpikir

Gambar 2.3.1
Kerangka berpikir

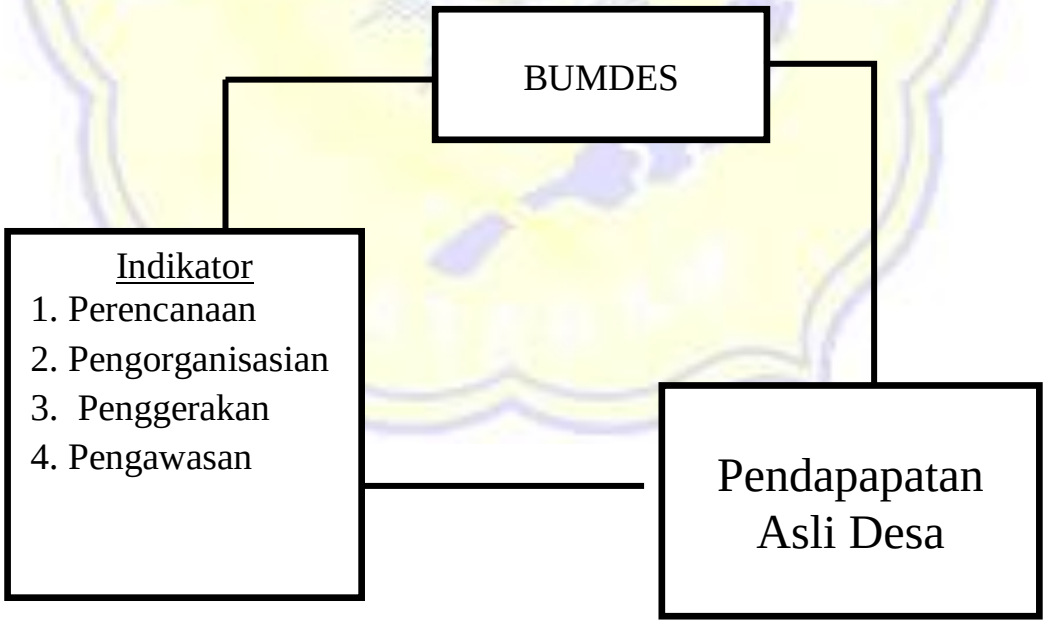

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Harbani Pasolong (2016: 32), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah satu model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia sebagai subyek utama dalam peristiwa sosial/budaya. Paradigma kualitatif mayakini bahwa di dalam masyarakat terdapat keteraturan.Keteraturan itu terbentuk secara natural, karena itu tugas peneliti adalah menemukan keteraturan itu, bukan menciptakan atau membuat sendiri batasan-batasannya berdasarkan teori yang ada.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif (penggambaran) yang menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dapat diuraikan dengan apa yang terjadi pada waktu melakukan penelitian. Terdapat di dalamnya upaya untuk menganalisis data, mencatat, menguraikan dan menginterprestasikan keadaan-keadaan yang saat ini terjadi atau ada . (Harbani Pasolong 2016: 75)

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel.Desa ini sebagai salah satu desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Adapun waktu penelitian ini direncakan akan berlangsung kurang lebih dua bulan, yakni mulai dikeluarkan surat izin penelitian sampai dengan selesai.

3.3. Pemilihan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini dilakukan secara bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Dari pertimbangan ini bahwa yangterlibat dalam mengetahui masalah ini yang akan diteliti dan dapat memberi data yang sesuai yang diinginkan. Dari keterangan di atas yang menjadi narasumber dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Desa Aikmel Utara, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes, dan Anggota Masyarakat.

TABEL 3.3.1.

NARASUMBER PENELITIAN

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DATA
1	Muhtasar Ayudi, SS., S. Pd.	Kepala Desa	Data primer
2	Irwan Rosidi, S. Kom	Sekretaris Desa	Data Primer dan Sekunder
3	Muh. Azhar Basri	Ketua BUMDes	Data Primer
4	Yontedi Hariadi	Sekretaris BUMDes	Data Sekunder
5	Pipin Rikina Putri	Bendahara BUMDes	Data Sekunder
6	Muhammaad Hudri	Anggota Masyarakat	Data Primer
7	Mustamiudin	Anggota Masyarakat	Data Primer
8	Dian Eli	Anggota Masyarakat	Data Primer

3.4. Sumber Data

a) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya (Harbani Pasolong: 2016:70). Data

primer didapatkan secara langsung dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap objek yang akan diteliti.

b) Data Sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian (Harbani Pasolong: 2016:70). Data sekunder diperoleh dari penelitian lain atau dari data-data yang ada di Instansi atau dari mana saja data yang sudah diolah.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

a) Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam (Sugiyono, 2017:166) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikhologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-prooses pengamatan dan ingatan. Teknik ini dilakukan dalam pengamatan langsung terhadap objek, yaitu bagaimana upaya pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Aikmel Utara.

b) Wawancara

Sugiyono (2017:157) mengemukakan bahwa wawancara digunakan sebgai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dalam

penelitian ini pihak yang akan diwawancara antara lain: Kepala Desa Aikmel Utara, Sekretaris Desa, Ketua BUMDes, Bendahara BUMDes, Sekretaris BUMDes dan Anggota Masyarakat.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data yang akan kita diambil dari beberapa peristiwa atau cacatan yang merupakan pelengkap dari teknik wawancara dan observasi. Dokumentasi biasanya digunakan untuk memperkuat setiap pelaksaan kegiatan ataupun program dari suatu kegiatan yang diimplementasikan.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah secara deskriftif, yaitu mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan data yang telah diperoleh secara menyeluruh dari lapangan baik dari hasil observasi, wawancara maupun bahan lainnya secara sistematis.

Melalui metode observasi peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian menganalisis data mengenai kegiatan maupun situasi secara deskripsi dan mendetail. Kemudian diperkuat dengan metode wawancara yang kemudian akan menghasilkan data yang akurat berupa kata-kata tertulis yang didapat dari arsip-arsip yang ada ataupun lisan dari pemerintah serta pengelola BUMDes Aikmel Utara. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan jawaban mengenai pengelolaan BUMDes Mitra Rinjani dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan menarik kesimpulan untuk memudahkan diri sendiri atau orang lain untuk memahaminya.